

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 e-Government

Teknologi informasi yang berkembang saat ini, bertujuan untuk pengembangan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Hal tersebut terkait dengan pengolahan data informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Hasil pemanfaatan teknologi digital telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru yang mereka istilahkan sebagai *Electronic Government (e-Government)* (Indrajit, 2004).

2.1.1.1 Pengertian e-Government

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) (2012) definisi *e-Government* merupakan :

“e-Government refers to the use by government agencies of information, technologies (such as Wide Area Networks, internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.”

E-Government pun didefinisikan oleh Eddy Satriya (2009) yaitu:

“Sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan *cost-effective* pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab (*accountable*) serta transparan kepada masyarakat.”

E-government (variabel bebas) menurut Indrajit (2004) yaitu:

“Merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang selama berjalan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penerapan *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh semua pihak baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif terkait dengan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam menyediakan *partner* bisnis dan akses informasi kepada publik secara lebih luas.

2.1.1.2 Manfaat *e-Government*

Menurut Indrajit (2004) manfaat *e-government* yaitu:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hai.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
- f. Memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sedangkan manfaat penerapan *e-government* sebagaimana yang dikatakan oleh CIMSA (2012) :

1. *E-Government* Meningkatkan Efisiensi

Teknologi Informasi dan Komunikasi membantu meningkatkan efisiensi tugas dan pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet juga dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan.

2. *E-Government* Meningkatkan Layanan

Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Layanan *e-government* juga dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.

3. *E-Government* Membantu Mencapai Hasil Kebijakan Tertentu

Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membantu pemangku kepentingan berbagai informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan.

4. *E-Government* Berkontribusi Terhadap Tujuan Kebijakan Ekonomi

E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi dan peningkatan informasi pemerintah.

5. *E-Government* Adalah Kontributor Reformasi Utama

Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.

6. *E-Government* Membantu Membangun Kepercayaan Antara Pemerintah dan Warganya

Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggungjawab serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan diatasi dengan baik, *e-government* dapat membantu memperdengarkan suara rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas

7. *E-Government* Meningkatkan Transparansi dan Tanggung Jawab

Teknologi Informasi dan Komunikasi ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil keputusan penting.

Berdasarkan manfaat tersebut, maka sistem *e-government* merupakan salah satu pendorong utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena sesuai dengan fungsinya yaitu dengan melaksanakan sistem *e-government* ini, akan tercipta sebuah sinkronisasi antara efektif dan efisiensi kerja aparat pemerintah, tersedianya wadah aspirasi masyarakat akan keterlibatannya terhadap pengambilan keputusan pemerintah dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atau masyarakat luas serta keterbukaan terhadap publik.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan Pada *e-Government*

Dalam konsep *e-government* dikenal empat jenis klasifikasi, hal ini seperti yang dikemukakan Indrajit (2004) yaitu :

1. *Governments to Citizens (G-to-C)*

Merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Aplikasi ini untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar

masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2. *Government to Business (G-to-B)*

Adanya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3. *Government to Government (G-to-G)*

Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar, bank-bank asing milik pemerintah di negara lain.

4. *Government to Employees (G-to-E)*

Aplikasi ini untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-government* pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur, yaitu sebagai berikut:

- a. Akses yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.

- b. Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik disejumlah instansi yang terkait.
- c. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar *back-office*, antar Portal Pelayanan Publik dengan *back-office*, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

Dengan demikian adanya pelayanan dalam penerapan *e-government* tersebut, maka terlihat fungsi dari sistem *e-government* yaitu tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah sebuah negara. Adapun menurut Indrajit (2004) dikatakan bahwa untuk menerapkan sistem *e-government* terdapat 3 element sukses, salah satunya yaitu capacity yang terdiri dari ketersediaan sumber daya yang cukup, infrastruktur teknologi informasi, dan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, untuk menerapkan sistem informasi dalam hal ini *e-government* perlu adanya penyediaan sub-sub dari sistem tersebut.

Hal ini sesuai komponen penunjang dalam aplikasi sistem informasi menurut Susanto (2008), komponen sistem informasi akuntansi, antara lain:

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Sejumlah perangkat *hardware* pada setiap organisasi harus memiliki secara lengkap dan memadai. Hal tersebut untuk menunjukkan adanya keterkaitan antar komponen *hardware*. Selain itu, setiap organisasi juga harus melakukan penggantian *hardware*, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasional organisasi.

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Dalam hal ini, *software* yang digunakan harus sesuai dengan program aplikasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi serta terkait dengan kemudahan yang diberikan oleh *software* tersebut.

c. Sumber Daya Manusia/Pengguna (*Brainware*)

Brainware merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan, sistem informasi, pengumpulan data pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi. Dalam komponen ini, terkait dengan klaifikasi pegawai yaitu pengetahuan akan sistem informasi, maka seharusnya setiap organisasi mengikutsertakan

pegawai dalam kegiatan pelatihan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala sebagai tambahan wawasan para pegawainya. Selain itu, organisasi/instansi juga harus menempatkan pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai sebagai penunjang pola kerja pegawainya.

d. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Adanya prosedur ini, akan memberikan kemudahan bagi pemberian informasi layanan dan aktivitas instansi secara sistematis, oleh sebab itu para pegawai harus memahami setiap aktivitas yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang dijalankan.

e. Database

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau didalam komputer (arti sempit). Informasi dan data yang tersedia harus tersimpan dan dikelola dengan baik dan terorganisir. Hal ini terkait dengan pentingnya sebuah data atau informasi maka penempatan dan penyimpanan data/informasi instansi harus baik.

f. Teknologi Jaringan Komunikasi

Telekomunikasi adalah penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Pada saat ini komunikasi satelit menggantikan saluran komunikasi kabel dan serat optik. Strategi telekomunikasi dan jaringan merupakan kunci sukses dalam membangun sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, maka setiap organisasi harus memiliki sistem telekomunikasi yang lengkap dan memiliki jaringan komunikasi yaitu koneksi internet yang memadai sebagai pendukung kegiatan.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap komponen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga komponen tersebut harus dipenuhi guna untuk pencapaian sistem *e-government*. Komponen tersebut dapat dijadikan sebagai indikator untuk sistem informasi, dalam hal ini yaitu penerapan *e-government*.

E-Government di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Namun dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan *E-Government* dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintahan mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintah secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama. Pelaksanaan *E-Government* di Indonesia sebagian besar barulah menggolongkannya sampai tingkat pertama, yang hanya sebatas memberi informasi kepada masyarakat melalui website. Sebagian kecil kantor pemerintahan sudah pada level kedua dan ketiga, yang diantaranya berupa Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) yang telah dikembangkan oleh beberapa pemerintah daerah. (Sumber : Bappenas.go.id)

Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan *E-Gov*, melalui Intruksi Presiden yaitu Impers Nomor 3 tahun 2003. Impers ini berisi tentang Srtategi Pengembangan *E-Government* yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan tentang *e-gov* seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggara *e-gov* di pusat dan daerah. Dalam impers ini, Presiden dengan tegas memerintahkan

kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun *E-government* dan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi.

2.1.2 Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *Good Governance* merupakan suatu konsep yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan dalam konsep *Good Governance* mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pemenuhan pelayanan publik/masyarakat pada suatu daerah/pemerintahan dan konsep *good governance* sendiri menjadi cita-cita bagi setiap bangsa pada saat ini.

2.1.2.1 Pengertian Good Governance

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2001) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Sedangkan secara konseptual menurut Sedarmayanti (2004) *good governance* yaitu :

“Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.”

Good Governance merupakan perangkat untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (<http://www.menpan.go.id>).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan dalam penyediaan

pelayanan barang dan jasa secara efektif dan efisien, tanggungjawab dan dengan supremasi hukum yang jelas bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

2.1.2.2 Pengertian Tata Kelola Pemerintah (*Good Government Governance*)

Menurut Sedarmayanti (2004) Pemerintah atau "*Government*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, ect*", berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah "keperintahan" atau dalam bahasa Inggris "*governance*" yaitu *the fact, manner of governing*" berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah didefinisikan sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

Menurut Joko Widodo (2001) konsep "*government*" menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Perwujudan *good government* menurut LAN dalam Joko Widodo (2001) adalah :

"Penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergiaan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society)."

Menurut Rencana Strategis LAN 2000-2004 dalam (Sedarmayanti, 2004), pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni : proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum

dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel; selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tata kelola pemerintahan merupakan sebuah proses pengarahan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang memiliki interaksi yang konstruktif di antara lembaga negara, sektor swasta dan masyarakat. Maka terselenggaranya tata kelola pemerintah merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah

Untuk dapat memenuhi tata kelola yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dijalankan sesuai dengan prinsip *good government governance* itu sendiri. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) (1997) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi: partisipasi (*participation*), aturan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*) (Sedarmayanti, 2004)

Konsep serupa juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, meliputi :

Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas.

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Efektivitas dan Efisiensi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, *actor* dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip *good governance* dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator.

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Pelaksanaan roda pemerintahan harus didukung dengan keterbukaan informasi kepada publik/rakyat. Pemerintah memberikan kemudahan dalam berbagai akses informasi dan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggungjawab kepada masyarakat. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan pembangunan, semua disampaikan secara transparan kepada rakyat dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melakukan kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah lainnya akan memberikan arus informasi yang cepat pula.

2. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Keterlibatan masyarakat secara langsung turut menggambarkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat maka pemerintah harus menyediakan sebuah forum tertentu untuk menampung aspirasi publik dan melibatkan instansi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stake holder*). Adanya kejelasan terkait dengan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan merupakan sebuah perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat mencerminkan proses pelaksanaan pemerintah berjalan pada rel dan koridor yang benar sesuai dengan harapan rakyat.

4. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada sebuah instansi akan

mempermudah tujuan efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintah tercapai.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh penerapan *e-government* terhadap tata kelola pemerintah di SKPD Kab Garut terdapat pada tabel 1.1.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitiannya	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Karin dan Fathul (2009)	Dampak <i>e-government</i> terhadap <i>Good Governance</i> (Temuan Empiris dari Kota Jambi)	- Variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah <i>e-government</i> - Variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah <i>Good governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-government</i> berdasarkan prinsip <i>good governance</i> mengalami peningkatan secara signifikan, artinya berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintah Kota Jambi
2	Irham Habib (2007)	Pengaruh <i>e-government</i> Terhadap Upaya Pelaksanaan <i>Good Governance</i> pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea Cukai Jakarta	-Variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah <i>e-government</i> -Variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah Upaya Pelaksanaan <i>Good governance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan <i>e-government</i> dengan upaya pelaksanaan <i>good governance</i>
3	Nurchayati dan Daru (2008)	Penerapan <i>e-government</i> Dalam Rangka Mewujudkan <i>Good governance</i> Bagi Masyarakat	-Variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah <i>e-government</i> -Variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah mewujudkan <i>good</i>	Hasil penelitian memnunjukkan bahwa penerapan <i>e-government</i> berpengaruh positif guna untuk menciptakan <i>Good governance</i>

			<i>governance</i>	
4	Sari Kartika Dewi (2013)	Pengaruh Penerapan <i>e-Government</i> Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kab. Cianjur	- Variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah penerapan <i>e-government</i> - Variabel dependent (y) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tata kelola pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-government</i> berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah
5	Anggita Fauziah (2017)	Pengaruh Penerapan <i>e-Government</i> Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Privinsi di Indonesia	- Variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah <i>e-government</i> - Variabel dependen (y1) dalam penelitian ini adalah efektifitas - Variabel dependen (y2) dalam penelitian ini adalah efisiensi pengelolaan keuangan daerah	- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-government</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah provinsi. - Penerapan <i>e-government</i> juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah provinsi di Indonesia
6	Firman Bimasakti (2011)	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis <i>Elektronik Government</i> di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang)	- Variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah tata kelola pemerintahan - Variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah <i>electronic government</i>	Hasil penelitan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berbasis <i>e-government</i> di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang masih tergolong dalam tahap <i>Integration</i> .

Berdasarkan review penelitian terdahulu diatas yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Karin dan Fathul (2009), Irham Habib (2007), Nurcahyati dan Daru (2008), Sari Kartika Dewi (2013), Anggita Fauziah (2017), Firman Bimasakti (2011) mengenai Pengaruh Penerapan *e-Government* Terhadap Tata Kelola Pemerintah, menunjukkan bahwa *e-Government* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tata Kelola Pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di SKPD Kabupaten Garut

Sistem pemerintah yang demokratis, memberikan perubahan dalam tatanan kehidupan bagi masyarakat maupun untuk pemerintah itu sendiri. Hal tersebut memacu pemerintah untuk mengupayakan kelancaran komunikasi antara stakeholder, masyarakat dengan Pemerintah. Sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan kontribusi atau partisipasi publik juga dapat terjalin. Permasalahan sosial yang timbul pada masyarakat luas sebagai dampak dari otonomi daerah juga mengakibatkan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengupayakan bagaimana memecahkan permasalahan tersebut.

Kemajuan teknologi informasi saat ini, mempengaruhi bagaimana pemerintah memenuhi segala aspek tatanan pemerintahan termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang ada sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat.

Hal tersebut sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa yang akan datang dimana masyarakat modern yang dimiliki bersifat kompleks, dinamis dan beraneka ragam harus bersikap melayani berbagai aspek dalam melayani masyarakat. Sebagai akibatnya terjadi tekanan dari masyarakat agar pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Maka muncul sistem *e-government* sebagai akibat dari tuntutan masyarakat.

E-Government menurut Indrajit (2004) adalah mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan antara dirinya dengan para stakeholder, yaitu masyarakat umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya, dengan menerapkan sistem *e-government*, akan memacu kinerja pemerintah yang lebih baik, karena manfaat *e-government* sendiri dapat meningkatkan efektif dan efisiensi kerja aparat pemerintah, arus informasi yang cepat, mudah dan tepat, adanya media yang menampung aspirasi masyarakat sehingga partisipasi antara masyarakat luas dengan pemerintah dapat terjalin secara langsung.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik (*good governance*)

Oleh sebab itu, sistem merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga dalam menunjang *good government governance*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengimplementasikan pengembangan sistem informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (*e-government*) yang dapat memberikan wadah partisipasi publik terhadap kebijakan yang akan dijalankan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya teknologi informasi berguna untuk alat penunjang dalam operasional sebuah instansi.

Pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan menjadi konsep *e-government* sangat penting dan harus diimplementasikan dengan baik sebagai faktor pendukung yang dapat mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pemerintah. *E-government* juga bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, serta sistem *e-government* juga bertujuan untuk mendukung *good governance* (Holle, 2011).

Manfaat yang diberikan dari penerapan sistem *e-government*, mencerminkan bahwa teknologi informasi, dapat dijadikan salah satu aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini karena dalam konsep tata kelola pemerintah yang baik mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pemenuhan pelayanan publik atau masyarakat pada suatu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan penyelenggaraan pemerintah juga dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari terwujudnya *good governance*.

Pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan menjadi *e-government* sangat penting dan harus diterapkan dengan baik sebagai faktor pendukung yang mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pemerintah. Hal ini karena sistem *e-government* meupun tata kelola pemerintah, kedua aspek tersebut mencerminkan adanya pengaruh dalam upaya peningkatan pelayanan publik, efektif dan efisiensi kerja pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Demian adanya *e-government* dapat berdampak terhadap terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Secara rinci dapat dijelaskan hubungan dari konsep tersebut, yaitu:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Dari gambar tersebut dapat dipaparkan *e-Government* merupakan sebuah perkembangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berbasis elektronik. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah. Selain itu, dengan menerapkan sistem *e-government* ini, maka tercipta transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pada tata kelola pemerintah, maka dengan demikian adanya penerapan *e-government* pada sebuah pemerintah

baik pusat maupun daerah dapat mewujudkan paradigma tata kelola pemerintah atau dengan istilah *Good Government Governance*.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka hipotesisnya yaitu :

H₁ Penerapan *e-Government* berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di SKPD Kabupaten Garut.

